

PERAN DNETWORK SEBAGAI AKTOR NON-NEGARA DALAM MENGATASI ISU TENAGA KERJA DISABILITAS DI INDONESIA

Ayu Diah Candra Kumala Dewi

Universitas Udayana

Karolina Paula Sisilia Surung

Universitas Udayana

Putu Titah Kawitri Resen

Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan peran DNetwork dalam mengatasi permasalahan pekerja penyandang disabilitas di Indonesia. Meski jaminan hak-hak pekerja penyandang disabilitas telah diakui dan dituangkan dalam konstitusi Indonesia, namun penerapan aturan tersebut tentu tidak bisa serta merta dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori transnasionalisme dan konsep LSM untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DNetwork berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan aktor lintas negara untuk mendukung pencapaian misinya. Kerja sama tersebut dilakukan dengan pemerintah daerah, pemerintah nasional, pemerintah internasional, organisasi internasional, organisasi nasional, organisasi lokal, kelompok atau komunitas masyarakat, bahkan individu. Dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, DNetwork telah mengambil peran dalam Pelatihan, Advokasi, Mendukung Proyek Percontohan, dan Fasilitator Komunikasi. Pelatihan merupakan upaya yang dilakukan DNetwork untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas agar lebih berdaya. Kemudian, advokasi yang dilakukan DNetwork untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan ketenagakerjaan disabilitas yang sedang berlangsung sehingga dapat menjadi pendorong keberhasilan program yang mereka gagas. Peran pendukung pilot project juga dilakukan oleh DNetwork yang kerap menjadi model bagi para pemangku kepentingan. Terakhir, melalui platform dan kemampuannya, DNetwork mampu menjadi penghubung antara penyandang disabilitas dengan berbagai pihak, begitu pula sebaliknya.

Keywords: Disabilitas, DNetwork, NGOs, Transnaional

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas mengenai peran DNetwork dalam upaya peningkatan aksesibilitas bagi tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Melalui upaya kerja sama transnasional, DNetwork menjalankan misinya untuk membantu mengembangkan peluang di dunia kerja bagi Penyandang Disabilitas. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011 dan mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016) yang mengadopsi prinsip-prinsip CRPD. Namun, SMERU Research Institute pada tahun 2020 melaporkan bahwa hingga tiga tahun pasca pengesahan UU Penyandang Disabilitas di Indonesia, kelompok Penyandang Disabilitas ini masih kurang diperhatikan dalam pembuatan rancangan maupun implementasi agenda pembangunan nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun penjaminan hak tenaga kerja disabilitas telah hadir dalam regulasi negara, implementasi dari aturan tersebut tidak serta merta dapat terlaksana.

Peran negara dalam menyediakan aksesibilitas bagi tenaga kerja disabilitas seharusnya menjadi tanggung jawab yang dijalankan sesuai amanah norma internasional. Selain negara, ternyata aktor non-negara dan internasional juga turut berkontribusi dalam mengatasi isu ini. Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja merupakan satu hal yang penting dan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi mereka telah menjadi tugas bersama. Di sini, aktor non-negara, khususnya organisasi non-pemerintah (NGO) seperti DNetwork, dan aktor internasional juga turut berperan dalam mengatasi isu ini. Hal ini menciptakan pertanyaan-pertanyaan penting tentang bagaimana peran aktor non-negara, dalam hal ini DNetwork, sebagai sebuah NGO mendukung penyerapan tenaga kerja disabilitas di Indonesia?

Penelitian terkait Penyandang Disabilitas, khususnya dalam bidang tenaga kerja, sebelumnya pernah dilakukan oleh Amalia Ramadhani pada tahun 2021. Penelitian Amalia menghasilkan skripsi berjudul “Peran International Labour Organization Terkait Diskriminasi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja di Indonesia Periode 2015-2019”. International Labour Organization (ILO) sebagai sebuah organisasi internasional mampu bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Artikel ini berkontribusi terhadap pemahaman peneliti mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh Organisasi Internasional untuk memenuhi hak tenaga kerja bagi disabilitas dan juga memberikan gambaran terkait peran organisasi internasional dalam membantu menangani isu tenaga kerja disabilitas. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengambil kebaruan penelitian melalui perbedaan jenis organisasi yang ingin diteliti. Kali ini, peneliti menganalisis peran DNetwork yang memegang peran sebagai salah satu Organisasi Non-Pemerintah di Indonesia sebagai subjek yang ingin diteliti.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik tertentu dari individu, kelompok, atau kronologi dari suatu peristiwa secara

tepat. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan peran Organisasi Non-Pemerintah melalui kerja sama transnasional dalam isu aksesibilitas tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah Organisasi Non-Pemerintah bernama DNetwork Indonesia yang bergerak dalam isu tenaga kerja disabilitas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap Project Manager DNetwork Indonesia dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian, pengumpulan data berbasis dokumen didapatkan melalui jurnal, buku, artikel, skripsi, serta undang-undang juga berita yang relevan.¹

Penelitian ini menggunakan teori Transnasionalisme dan konsep NGO untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang ingin diteliti. Transnasionalisme adalah pendekatan dalam ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan peran aktor non-negara, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), perusahaan multinasional, dan individu, dalam membentuk hubungan melewati lintas batas negara, bahkan dapat mempengaruhi kebijakan internasional.² Aktor-aktor transnasional ini memiliki berbagai tujuan dan kepentingan, termasuk isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, perdagangan, kesejahteraan sosial, bahkan isu disabilitas sekalipun. Mereka sering kali bekerja di luar kendali pemerintah dan dapat membentuk koalisi dan jaringan yang melintasi negara-negara.

Hubungan yang terjalin melalui lintas batas negara salah satunya dilakukan oleh organisasi non-pemerintah sebagai aktor internasional. Organisasi Non-Pemerintah atau yang kerap disebut sebagai Non-Governmental Organization (NGO) merupakan entitas yang independen dari pemerintah. Menurut Tuijl, NGO dapat diuraikan sebagai organisasi yang independen dan memiliki tujuan dalam peningkatan kualitas hidup kaum atau kelompok yang termarginalkan.³ Ruang lingkup kegiatan dari NGO dapat berskala lokal, nasional, bahkan internasional. NGO umumnya merupakan organisasi nirlaba yang pembiayaannya berasal dari sumbangan pihak swasta, organisasi internasional, pemerintah, atau bahkan kombinasi dari semuanya. Pembentukan NGO utamanya bertujuan untuk melayani maupun mengakomodasi kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu yang diwakili.⁴ Secara umum, NGO dapat memiliki peranan antara lain; Pembangunan dan Pengoperasian Infrastruktur; Mendukung Inovasi, Demonstrasi, dan *Pilot Project*; Fasilitator Komunikasi; Bantuan Teknis dan Pelatihan; Advokasi Isu; serta Penelitian, Pengawasan, dan Evaluasi.⁵

¹Mary W. George, *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*, (New Jersey: Princerton University, 2008).

²Ani Soetjipto, *Transnasionalisme: Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018).

³Peter Van Tuijl, "NGOs and Human Rights: Sources of Justice and Democracy," *Journal of International Affairs* 52, no. 2 (1999): 493-512

⁴"Nongovernmental Organization," *Ensiklopedia Britannica*, diakses pada 25 September 2023 di <https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization>.

⁵William J. Cousins, *The Urban Poor and Basic Infrastructure Services in Asia and the Pacific*, (Manila: Asian Development Bank, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kerja Sama Transnasional DNetwork dalam Mengatasi Isu Tenaga Kerja Disabilitas di Indonesia

DNetwork merupakan salah satu NGO yang bergerak di bidang disabilitas sejak pendiriannya pada tahun 2013. Misi utama DNetwork adalah memberikan dukungan dalam meningkatkan potensi ekonomi para Penyandang Disabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Dalam upayanya, DNetwork berkolaborasi dengan Penyandang Disabilitas, perusahaan-perusahaan, serta individu dan kelompok yang memiliki ketertarikan dalam isu-isu disabilitas dan pemberdayaan ekonomi. Mereka bersama-sama merancang program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para Penyandang Disabilitas agar bisa terlibat dalam dunia kerja, baik sebagai karyawan di perusahaan maupun sebagai pengusaha yang mandiri. Selain itu, DNetwork juga berfokus pada penguatan kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Upaya peningkatan akses Penyandang Disabilitas terhadap dunia kerja dapat dilihat sebagai langkah dengan dampak jangka panjang. Ketika Penyandang Disabilitas memiliki akses yang lebih besar ke pekerjaan, hal ini dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap mereka. Pandangan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas yang dinilai memiliki keterbatasan kemampuan akan mulai tergantikan ketika mereka melihat bahwa Penyandang Disabilitas juga dapat bekerja dan berkontribusi pada masyarakat.⁶ Hal tersebut juga diyakini oleh *Project Manager* dari DNetwork, I Made Wisnu Saputra sebagai berikut.

“Kalo misi kita sebenarnya adalah agar teman-teman disabilitas bisa berdaya secara ekonomi dan berkelanjutan, dengan cara kita membuka akses ke pekerjaan. Kalo membuka pekerjaan itu bisa kita lihat hasilnya secara langsung ketika mereka bisa kerja, tapi di sisi lain kita kadang gak tau seberapa jauh akses pekerjaan ini bisa berdampak ke dia sebagai individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian misalnya ke orang lain, secara tidak langsung dia bisa menjadi contoh atau bahkan merubah stigma. Misalnya kalau sekarang gak banyak teman-teman disabilitas yang ada di jalanan karena mungkin mereka gak bisa keluar, tapi nanti ketika semakin banyak mereka ada di jalanan, kita yang non-disabilitas bakalan terbiasa melihat mereka, jadi itu bukan hal yang aneh lagi. Dan dari sana pun nanti akan ada semacam stimulasi tidak langsung ke lingkungan. Jadi, memang ada *domino effect* yang kita gak tahu, tapi sebenarnya sudah terjadi hanya karena satu orang ini bekerja.”

Dalam mencapai tujuannya, DNetwork melakukan upaya-upaya kerja sama dengan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kalau untuk kerja sama, kita sangat menjunjung tinggi kerja sama

⁶Dhea Erisa and Dini Widinarsih, "AKSES PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PEKERJAAN: KAJIAN LITERATUR," *Jurnal Pembangunan Manusia*: Vol. 3: No. 1, Article 28. DOI: 10.7454/jpm.v3i1.1027.

sebenarnya, karena sebagai non-profit, DNetwork sangat sulit untuk bergerak sendiri, jadi saling melengkapi lah istilahnya dengan partner kita gitu. Contoh misalnya DNetwork tahu program apa yang harus dilakukan, gimana cara memberikan solusi ke masalah yang ada di sektor tenaga kerja disabilitas, tapi DNetwork gapunya dananya, jadi kita bekerja sama dengan beberapa pihak yang bisa kasi dana dan kita bisa implementasikan. Jadi, kurang lebih saling membantu disana, kemudian kita juga ada beberapa organisasi yang memang mau *volunteer* dengan kita. Misalnya mereka punya visi misi yang sama, walaupun itu tidak mengkhusus ke disabilitas, tapi mereka *aware* dengan kaum yang termarginalkan seperti itu, jadi mereka mau ikut serta. Entah itu mereka memberikan ilmunya, tenaganya, maupun secara finansial, jadi ya penting sih sebenarnya kerja sama itu.”

Dari pernyataan Wisnu di atas dapat dilihat bahwa DNetwork melakukan kerja sama bersama berbagai pihak dengan tujuan untuk memperbesar dampak yang mereka berikan kepada para Penyandang Disabilitas. Juliana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa NGO merupakan aktor kebijakan tipe *subject* yang berarti masih memiliki tingkat kekuasaan atau *influence* rendah sehingga memerlukan kerja sama dengan aktor lain baik dari pemerintah maupun sektor swasta.⁷

Kerja sama tersebut tidak hanya dilakukan kepada pihak-pihak yang ada di dalam negeri, namun juga melibatkan aktor internasional lainnya. Hubungan kerja sama dijalin dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi isu tenaga kerja disabilitas ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wisnu sebagai berikut.

“DNetwork sudah kerja sama dengan banyak pihak, baik itu pemerintah atau swasta, tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kerja sama ini dilakukan dengan melihat kepentingan segala pihak. Misalnya, kalau itu pemerintahan internasional, maka kita lihat hubungan kerja sama antar negara dengan Indonesia, dari sana kita lihat kapasitas mereka ada di mana dalam pemberian bantuan atau kerja sama. Kalau organisasi, kita lihat juga mereka fokus di sektor apa. Sejauh ini kerja sama bisa dalam bentuk finansial sebagai donor atau sponsor, ada juga yang memberikan ide atau praktik baik mereka, pengetahuan, tenaga, dan lain lain. Untuk non-finansial kerja sama yang diberikan juga bisa berupa pelatihan untuk pengembangan kapasitas staff DNetwork itu sendiri, atau ke teman-teman disabilitasnya langsung.”

Kerja sama lintas batas negara dapat memiliki dampak dalam beberapa hal, yakni dukungan finansial, pembangunan jaringan kerja, serta peningkatan kapasitas. Aktor-aktor internasional seperti organisasi internasional dan pemerintah asing, dapat memberikan hibah dana kepada NGO untuk mencapai misi mereka. Dukungan finansial ini dapat digunakan untuk membiayai program serta *project* yang dirancang dan diimplementasikan

⁷Juliana Juliana and Budi Puspo Priyadi, “Strategi LSM dalam Impelementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Tenaga Kerja Berdasarkan Perspektif Kekuasaan dan Kepentingan di Kota Semarang, “*Journal of Public Policy And Management Review* 10, no. 2 (2021): 1-15, doi: 10.14710/jppmr.v10i2.30215.

oleh NGO.⁸ Kemudian, dalam penguatan kapasitas, aktor internasional dapat memberikan dukungan teknis dan pelatihan yang membantu NGO dalam menjalankan program-program mereka.⁹

Salah satu bentuk hubungan transnasional yang dimiliki oleh DNetwork adalah pendanaan dari Inspirasia Foundation. Merujuk dalam laman resminya, Inspirasia Foundation merupakan CIO (Charitable Incorporated Organisations) yang berdedikasi untuk mendanai dan mendukung proyek-proyek luar biasa di bidang kesehatan dan pendidikan bagi komunitas marginal di Thailand, Indonesia, India, dan Malta. Inspirasia Foundation sendiri telah mendukung DNetwork sejak peluncurannya pada tahun 2013. Selain fokus pada pendanaan, Inspirasia Foundation juga melakukan peningkatan kapasitas terhadap organisasi *berupa in-kind* yang jarang terlihat secara *external/publik*. Hal tersebut menjadi contoh kerjasama yang dilakukan oleh DNetwork dengan aktor internasional di luar negara lingkup keja, Indonesia.

Jika dihubungkan kembali dengan konsep transnasionalisme oleh Soetjipto dalam bukunya “Transnasionalisme – Peran Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional”, ia memberikan konsep sederhana transnasionalisme sebagai aktivitas yang dilakukan lintas batas negara dan salah satu aktornya bukan merupakan aktor negara. Teori Transnasionalisme adalah pendekatan yang penting dalam ilmu Hubungan Internasional yang menekankan peran aktor non-negara dalam hubungan internasional. Peran ini dapat terlihat dalam pengawalan isu internasional dan cara mereka mengatasi isu tersebut. DNetwork sebagai sebuah NGO telah menjadi salah satu aktor yang berperan dalam penanganan isu tenaga kerja disabilitas di Indonesia melalui jaringan transnasional. Melalui perannya sebagai NGO, DNetwork mencapai misinya dengan melakukan kerja sama bersama banyak aktor lainnya, termasuk pemerintah dalam negeri, swasta, bahkan jaringan di luar negeri sekalipun. Kerja sama lintas batas negara menjadi salah satu strategi yang diambil DNetwork untuk mencapai tujuannya dalam memberikan pencapaian ekonomi bagi Penyandang Disabilitas sehingga mereka dapat berdaya.

Peran DNetwork dalam Mengatasi Isu Tenaga Kerja Disabilitas di Indonesia

Peran suatu NGO sebenarnya cukup bervariasi menyesuaikan dengan misi dan tujuan yang ingin dicapainya. Meskipun demikian, William menyebutkan bahwa NGO dapat memiliki beberapa peranan krusial antara lain; Pembangunan dan Pengoperasian Infrastruktur; Bantuan Teknis dan Pelatihan; Advokasi Isu; Mendukung Inovasi, Demonstrasi, dan *Pilot Project*; Fasilitator Komunikasi; serta Penelitian, Pengawasan, dan Evaluasi. Berdasarkan hal tersebut, peran DNetwork akan dikategorikan ke dalam poin-

⁸Fani Auliari, “Peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Rusia” (Skripsi., Universitas Riau, 2013).

⁹Dara Amanda Siwabessy, “Community Based Ecotourism: Kerjasama WWF (World Wide Fund for Nature) dengan Masyarakat Adat Rheapang Muatit dalam Perlindungan Satwa Langka Tahun 2015-2017” (Skripsi., Universitas Kristen Satya Wacana, 2020).

poin yang ada.¹⁰

DNetwork sendiri sebagai NGO yang berkomitmen terhadap peningkatan kehidupan Penyandang Disabilitas Indonesia melalui penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan inklusifitas di lingkungan kerja. Secara umum, DNetwork membantu pengembangan peluang untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan pekerjaan dan membantu mengintegrasikan diri mereka ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Dengan menggunakan platform online, DNetwork menghubungkan pencari kerja Penyandang Disabilitas dengan pemberi kerja, sekaligus menawarkan layanan profesional untuk bisnis yang ingin menciptakan tempat kerja yang lebih inklusif.

Kemudian, lebih lanjut daripada itu, peran DNetwork dapat dikategorikan ke dalam Bantuan Teknis dan Pelatihan melalui pengembangan kapasitas masyarakat disabilitas. Hal tersebut terlihat dalam wawancara Wisnu sebagai berikut.

“Pengembangan kapasitas sebenarnya bukan jadi fokus utama DNetwork sendiri, tapi lebih ke penyerapan tenaga kerja. Tapi kalau kita melihat faktanya, masih ada gap antara kualifikasi teman-teman disabilitas dengan permintaan dari perusahaan. Jadi, selama gap ini masih ada, maka DNetwork perlu memberikan pengembangan kapasitas bagi teman-teman disabilitas.”

Pengembangan kapasitas tersebut salah satunya dikemas dalam program edukasi dengan berbagai tema yang disesuaikan dengan *trend* maupun minat *user* DNetwork. Sebagai contoh, di tahun 2023, DNetwork berfokus pada bidang wirausaha sehingga mengajak Penyandang Disabilitas yang berminat pada dunia wirausaha untuk bergabung dalam program pengembangan kapasitas mereka. Pengembangan kapasitas ini dilakukan mulai dari *sharing session* kiat-kiat membuka usaha, pemberian bantuan dana untuk pembuatan *prototype*, sampai akhirnya produk dari usaha para Penyandang Disabilitas ini siap untuk dijual.¹¹

Kemudian, DNetwork juga memainkan peran dalam Pengawasan atau Advokasi Isu terkait disabilitas. NGO memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu sosial, yang dalam kasus ini lebih mengkhusus terkait disabilitas. Hal tersebut dilakukan untuk menyukseskan tujuan dari program-program yang ingin digagas.

“Advokasi ada dan dilakukan apabila diperlukan. Karena, untuk teman-teman disabilitas bisa mengikuti pelatihan, diterima bekerja, dan lain lain, ada beberapa hal kecil yang tidak signifikan tapi bisa menjadi komponen yang menghambat untuk kita bisa menjadi inklusif dan mendapatkan hasil yang sesuai dari program yang sudah dirancang. Jadi, apabila diperlukan, kami akan bahas isu-isu ini, walaupun tidak terlalu mendalam, setidaknya kita bisa meningkatkan awareness publik, perusahaan, pemerintah atau organisasi, misalnya melalui konten-konten edukasi melalui sosial media.

¹⁰William J. Cousins, *The Urban Poor and Basic Infrastructure Services in Asia and the Pacific*, (Manila: Asian Development Bank, 1991).

¹¹Saputra, I. M. W., Project Manager DNetwork Indonesia, wawancara dengan penulis, 24 Oktober 2023.

Mungkin, isu-isu ini terlihat sepele, tapi kalau kita alami terlalu sering bisa jadi bukan hal sepele lagi.”

Peran DNetwork juga dapat diidentifikasi dalam Mendukung Inovasi, Demonstrasi dan Proyek Percontohan. NGO dapat menjadi percontohan untuk proyek-proyek pemerintah yang lebih besar karena kemampuan mereka untuk bertindak lebih cepat dibandingkan birokrasi pemerintah. Pemangku kepentingan kerap mengundang DNetwork sebagai rekan diskusi dalam penanganan isu terkait disabilitas.

“Kita kemarin bekerja sama dengan satu Dinas yang ada di Kota Denpasar. Mereka memiliki satu ide yang sejalan dengan DNetwork, jadi kita yang melakukan implementasi ide mereka. Kalau kegiatan pemerintahan lain, DNetwork sering diundang sebagai pembicara, terutama untuk membahas praktik baik dalam penyerapan tenaga kerja disabilitas.”

Kemudian, yang terakhir, peran DNetwork dapat didefinisikan sebagai Fasilitator Komunikasi. NGO kerap memakai metode komunikasi personal serta mempelajari titik dimana mereka dapat masuk dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, NGO sering kali menjadi penghubung antar berbagai pihak. Hal ini dapat terlihat dari metode yang dilakukan DNetwork.

“Dari sisi *platform*, kita membantu menyebarkan informasi kesempatan kerja untuk teman-teman disabilitas. Kita membantu dari hampir semua sisi. Untuk teman-teman disabilitas, misalnya, kita bantu dari sisi pendaftaran, membantu dalam pembuatan atau perbaikan CV, tips untuk mengikuti interview. Kalau dari sisi perusahaan, kita bantu untuk advokasi pentingnya merekrut disabilitas, cara membuka lowongan, negosiasi pada *requirements* untuk mempersempit gap kualifikasi. Jadi hal ini dilakukan biar semua gap (-antara kualifikasi tenaga kerja dengan kriteria lowongan) akan *match*.”

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa DNetwork sebagai aktor non-negara telah secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aktor lintas batas negara, guna mendukung pencapaian tujuan mereka. Kerja sama ini mencakup pemerintah setempat, pemerintah nasional, lembaga internasional, organisasi nasional, entitas lokal, kelompok masyarakat, dan bahkan individu. Dalam menghadapi isu ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas, DNetwork telah mengemban peran dalam menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas dengan dunia kerja. Peran tersebut diwujudkan oleh DNetwork melalui beberapa hal, yaitu pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas, advokasi isu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas, mendukung proyek percobaan yang sering menjadi contoh bagi pemangku kepentingan, dan sebagai fasilitator komunikasi yang menghubungkan Penyandang Disabilitas dengan berbagai pihak dan sebaliknya.

REFERENSI

- Auliarini, Fani. (2013). *Peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Rusia*. [Karya Ilmiah, Universitas Riau]. Repositori Unri. Diakses pada 23 Oktober 2023 di <https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/2400>
- Erissa, D. & Dini. (2022). Akses Penyandang Disabilitas terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3 (1). DOI: 10.7454/jpm.v3i1.1027
- George, M. (2008). *The Elements of Library Research*. Princeron University Press.
- Hastuti, dkk. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas [Kertas Kerja]. SMERU Research Institute. Diakses pada 19 September 2023 di https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf
- Juliana, & Priyadi, BP. (2021). Strategi LSM dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Tenaga Kerja Berdasarkan Perspektif Kekuasaan dan Kepentingan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10 (2). Diakses pada 30 September 2023 di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30215>
- Karns, M. P. (2023). Nongovernmental Organization. Dalam Ensiklopedia Britannica. Diakses pada 25 September 2023 di <https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization>
- Tujil, Peter Van. (1999). NGOs and Human Right: Sources of Justice and Democracy. *Jurnal of international affairs*, 52 (2). Diakses pada 25 September 2023 di <http://www.jstor.org/stable/24358050>
- Siwabessy, D. A.. (2020). *Community Based Ecotourism: Kerja sama WWF (World Wide Fund for Nature) dengan Masyarakat Adat Rheapang Muaif dalam Perlindungan Satwa Langka Tahun 2015-2017*. [Skripsi S1, Universitas Kristen Satya Wacana]. Repositori UKSW. Diakses pada 30 September 2023 di <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/25957>
- Soetjipto, Ani. (2018). *Transnasionalisme–Peran Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Ramadhani, A. (2021). *Peran International Labour Organization Terkait Diskriminasi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja di Indonesia Periode 2015-2019*. [Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. Repositori UIN Jakarta. Diakses pada 30 September 2023 di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58278>
- William, W. (1991). *The Urban Poor and Basic Infrastructure Services in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank: Manila.